

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jannatul Firdaus ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2009

Pembimbing,


Drs. Makinuddin, SH, M.Ag

Drs. Makinuddin, SH, M,Ag

NIP 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jannatul Firdaus ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Makinuddin, SH. M, Ag
NIP 195711101996031001

Sekretaris,

Darmawan, S.Hi, M.Hi
NIP198004102005011004

Penguji I,

Dra. Dakwatul Chairah, M.Ag
195704231986032001

Penguji II,

Dra. Nurhayati, M.Ag
195704231986032001

Pembimbing,

Drs. Makinuddin, SH. M, Ag
NIP 195711101996031001

Surabaya, 04 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faisha
NIP. 19500520

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 95005201982031002

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II WARIS DALAM ISLAM.....	16
A. Pengertian.....	16

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam terdapat istilah *Syarī'at* atau saat ini dikenal dengan istilah Hukum Islam, yaitu ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perbuatan atau larangan, meliputi seluruh aspek manusia.¹

Ketetapan tersebut bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindari kerusakan, problema dan bahkan pertumpahan darah. Jadi, Apabila manusia mengikuti aturan tersebut, maka kerusakan yang dikhawatirkan tidak akan terjadi.²

Orang Islam dituntut untuk patuh terhadap '*iradat* Allah, dan *syāra*' atau hukum Islam merupakan hukum Allah. Tuntutan tersebut merupakan suatu kewajiban. Apabila melaksanakannya mendapatkan jaminan syurga, sebagaimana terdapat dalam Qs. An-Nisa' : 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 46

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 1

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁷

menimbulkan keinginan beberapa pihak mendapatkan tanah tersebut secara penuh, padahal di dalam hukum Islam dengan sangat jelas telah ditentukan ketetapan pembagian itu, dan disini tanah waris tersebut tidak dibagi.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti menganggap penting kajian tentang sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian sejenis sehingga menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah adalah masalah Waris.

Masalah waris sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian tentang sengketa tanah waris yang tidak dibagi, bisa jadi - kalau tidak - sudah pasti - penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul.

Upaya pembahasan tentang waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, diantaranya oleh : Syahrul Munir tahun 2000 di dalam tulisannya “*Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*”.¹¹ Disamping itu juga di dalam tulisannya Nikmatul Khayati pada tahun 2000, dengan topik “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tambak Sari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*”.¹² Dimana keduanya lebih fokus meneliti dan membahas kebiasaan serta alasan penundaan pembagian harta waris karena alasan-alasan tertentu.

¹¹ Syahrul Munir, *Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri* Tahun 2000. Seorang Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2000.

¹² Nikmatul Khayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tambak Sari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)* Tahun 2000.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mendiskripsikan sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

- ## 1. Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah ragam ilmu keislaman khususnya tentang permasalahan waris.

- ## 2. Aspek Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang kewajiban membagi harta waris sesuai ketentuan yang ada, yaitu di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

G. Metode Penelitian

- a. Data tentang deskripsi sengketa tanah waris yang tidak dibagi di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
- b. Data tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari hasil wawancara dengan :

1. Pihak-pihak yang bersengketa tanah waris karena tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu Zaini dan Munir

secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.¹⁶

Hal tersebut dilakukan demi untuk memberikan keterangan secara sempurna tentang sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa tersebut beserta alasan-alasannya, sehingga dapat diketahui apakah masyarakat tersebut peka terhadap hukum waris seharusnya mereka pahami dan laksanakan.

c. Telaah Dokumen

Untuk lebih menyempurkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi agar kemudian pembahasan dalam penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan adanya rujukan pasti tentang hukumnya. Yaitu data tentang kepemilikan secara sah tanah waris yang disengketakan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode, yaitu:

a. Deskriptif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi di desa Desa Blumbungan

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang sengketa tanah waris yang tidak di bagi di Desa tersebut.

b. Analitik Verifikatif dengan Pola Pikir Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis sengketa tanah waris yang tidak di bagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Hukum Islam untuk mengetahui secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang kewajiban membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan (*naş*) yang ada, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta di mana harta waris berupa tanah yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sehingga menimbulkan sengketa.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab, yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pemabahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan skripsi, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memfokuskan pada kerangka teoritis tentang waris secara umum dan menguraikan tafsiran terhadap ayat-ayat waris.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi sengketa tanah waris yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan serta menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa dan analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima penutup, merupakan bab akhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

BAB II

WARIS DALAM ISLAM

Kata *wāris* berasal dari bahasa Arab *al-mīras* (الميراث), merupakan bentuk

masdar dari kata *warisa-yariṣu-irṣan-miṣān* (ورث-يرث-إرثا-ميراث). Secara

Secara istilah, *al-mīras* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang

Istilah tentang peralihan harta dari orang yang meninggal kepada yang

hidup juga disebut dengan istilah *farā'id*. Lafaz *farā'id* (فرائض) merupakan

uk *jāma'* dari lafaz *farīdah* (فريضة) yang semakna dengan lafaz *mafrūdah*

(مفر) yakni bagian yang sudah dipastikan kadarnya. Dan dalam ilmu *wāris*

¹ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 33

² *ibid.*

tanpa memerlukan penyebutan yang jelas, akan tetapi berbeda dengan orang yang hanya percaya kepada Allah padahal tidak percaya terhadap Rasul-Nya, dikatakan tidak memiliki agama yang sempurna.³⁵

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas, menjelaskan tentang dasar-dasar kewarisan melalui beberapa jalur seperti kekerabatan dan perkawinan serta penjelasan beberapa ahli waris yang mendapatkan hak secara pasti dan rinci. walau terdapat pula golongan yang kedudukannya sebagai ahli waris akan tetapi tidak disebutkan dalam al-Qur'an, seperti ayah, anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka dengan demikian golongan ini tidak termasuk ahli waris yang menerima secara *furuḍ* akan tetapi bisa mewarisi secara '*asābah* atau *zawīl arḥām* seperti dalam keterangan Hadis Nabi yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Ayat tersebut diatas merupakan asas ilmu *farā'id*, oleh karena itu, orang yang mengetahui bahkan menghafal ketentuan tersebut diatas, akan semakin mengetahui hikmah pelaksanaannya sehingga semakin mudah

perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁵⁹

adalah hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum harta tersebut
dibagikan yang diambilkan dari harta si-Mayit.⁶³

perawatan jenazah dan pembayaran hutang-hutangnya dan disetujui oleh ahli waris yang lain, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan.⁷⁰

Sedangkan sebidang tanah kecil yang terletak diatas sungai dibawah rumah Zahra di utara masjid, karena hanya sepetak tanah kecil saja.⁵

Berselang beberapa tahun, istri H. Mostapa Asmat meninggal dunia dan saat itu tinggalah 2 bersaudara yang masih hidup dengan sepetak tanah yang berada diatas sungai. Tidak ada pembagian tanah tersebut karena hanya sepetak tanah kecil yang tidak memungkinkan untuk dijual atau ditempati. Tanah itu hanya sebuah tanah kecil yang cocok untuk ditanami saja dan saking kecilnya saudara-saudari yang lain dimasa hidupnya tidak sadar akan keberadaannya.

Berselang beberapa tahun, istri H. Mostapa Asmat meninggal dunia dan saat itu tinggalah 2 bersaudara yang masih hidup dengan sepetak tanah yang berada diatas sungai. Tidak ada pembagian tanah tersebut karena hanya sepetak tanah kecil yang tidak memungkinkan untuk dijual atau ditempati. Tanah itu hanya sebuah tanah kecil yang cocok untuk ditanami saja dan saking kecilnya saudara-saudari yang lain dimasa hidupnya tidak sadar akan keberadaannya.

Sudah bukan rahasia lagi, kedua bersaudara itu bermusuhan sampai akhir hayat mereka. Entah karena masalah apa keduanya selalu bersitegang, tidak ada yang tahu mengapa kedua bersaudara itu bertengkar setiap kali bertemu, baik dalam forum resmi seperti undangan atau tanpa sengaja bertemu di jalan dan berpapasan. Akan tetapi bukan rahasia umum pula bahwa faktor harta yang sering kali menjadikan keduanya tidak akur.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Riyadi, tetangga H. Mostapa Asmat pada tanggal 17 April 2009.

Karena merasa tidak enak terhadap Munir, Mudzakir mendatangi Rusdi sahabat Zaini dengan tujuan Rusdi memberitahukan kepada Zaini bahwa rumahnya berdiri diatas tanah milik Munir. Saat itu, Mudzakir tidak menjelaskan secara detail bahwa tanah tersebut dibeli atau diberikan kepada Munir, tetapi yang jelas tanah tersebut adalah milik Munir. Rusdi-pun menemui Zaini dan menyampaikan pesan Mudzakir selaku paman dari Zaini.

Saat itu Zaini mulai gelisah dan bingung. Di satu pihak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya seorang anak yang diberi (*hibah*) sebidang tanah oleh orang tuanya untuk dibangun rumah atas persetujuan 7 saudaranya. Akan tetapi dilain pihak, Zaini tidak bisa begitu saja menerima kabar itu karena kenapa Mudzakir tidak menyampaikan secara langsung hal tersebut kepadanya. Ketika hendak konfirmasi terhadap Mudzakir, beliau Mudzakir sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal beliau sempat berusaha kuat untuk mengatakan sesuatu terhadap Zaini, tetapi tidak mampu. Akhirnya Zaini menanyakan kepada Mas'udah (istri Mudzakir) perihal tanah tersebut. Herannya istri Mudzakir mengaku tidak pernah mendengar dan diceritai perihal tanah itu. Begitu pula Subki (anak angkat Mudzakir) dia tidak pernah mendengar beliau bercerita atau menyinggung perihal tersebut. Akan tetapi, Subki mengakui bahwa alm. Mudzakir lebih akrab terhadap keluarga Munir dari pada keluarga

- b. Harta tersebut tidak dibagikan sampai ahli waris hanya tinggal Mudzakkir dan Aliwafa yang mentransaksikan harta (tanah) kepada orang lain secara penuh dengan jalan dijual dan di-*hibah* kan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH WARIS YANG TIDAK DIBAGI (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pemekasan)

A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatar Belakanginya Terjadinya Sengketa

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa bermula ketika H. Mostapa Asmat membagikan harta berupa tanah miliknya ketika masih hidup kepada putra-putrinya. Pemberian yang dikategorikan sebagai hibah, yaitu pemberian seseorang terhadap orang lain pada masa hidup tanpa mengharap suatu imbalan, dilakukan seseorang atau beberapa orang, dari saudara kepada saudaranya, orang tua terhadap anaknya atau dari orang lain terhadap orang lain. Demikian pula pemberian yang dilakukan oleh H. Mostapa Asmat terhadap putra-putrinya berupa tanah tergolong kategori hibah karena tanah tersebut merupakan milik H. Mostapa Asmat secara sah sehingga memenuhi syarat pemilik hibah, yaitu pemilik harta secara sempurna, oleh karena itu, pemberian tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan demi kemaslahatan serta untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih-sayang diantara keluarga.

H. Mostapa Asmat yang telah memberikan tanah miliknya kepada putra-putrinya demi kelangsungan hidup keluarga mereka sejalan dengan anjuran agama. Dimana untuk melangsungkan hidup dengan keluarga baru, putra-

Pola pikir yang dimiliki oleh Aliwafa berkenaan dengan kepemilikannya secara mutlak terhadap tanah tersebut dilatar-belakangi oleh ketelatenannya menghidupkan tanah tersebut menjadi sangat subur bahkan hingga mencapai puluhan tahun. Dimana perawatan bahkan pajak tanaman dibayar olehnya. Tanah yang seperti telah sangat mendarah-daging dengan dirinya, pastilah sangat dianggap miliknya. Satu hal yang sempat bahkan sangat dilupakan oleh Aliwafa bahwa pembayaran pajak bukan berarti menunjukkan kepemilikan sebagaimana catatan kecil dalam lembar pembayaran pajak yang terdapat di pojok bawah. Karena perawatan selama bertahun-tahun itulah, Aliwafa meng-*hibah*-kan tanah itu kepada putranya yang bernama Zaini. Dan Zaini, keturunan dari Alifawa yang saat itu beranggapan bahwa tanah itu adalah milik mutlak ayahnya menerimanya dan membangun diatasnya sebuah rumah.

Dilain pihak, Mudzakkir saudara kandung Aliwafa yang termasuk bagian dari ahli waris H. Mostapa Asmat yang menyadari akan adanya tanah tersebut adalah milik alm. Ayahnya menjual tanah tersebut kepada Munir, yang mana merupakan anak dari Zahra, alm. Saudarinya (termasuk ahli waris H. Mostapa Asmat). Pada saat itulah, dua transaksi pengalihan harta dilakukan dua orang ahli waris secara berbeda dengan akad dan tempat yang berbeda tanpa mufakat terlebih dahulu.

Seharusnya langkah awal yang harus dilakukan oleh ahli waris yang masih ada pada saat kematian H. Mostapa Asmat membaginya secara rata walaupun

tanah itu sempit dan terlalu kecil untuk dibagi. Apapun alasannya tanah tersebut merupakan hak orang banyak (yaitu ahli waris) yang harus dibagikan sesuai ketentuan yang ada, yaitu istri mendapat $\frac{1}{8}$ karena ada anak, dan anak-anak H. Mostapa Asmat mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dengan perbandingan 2 : 1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Oleh sebab itu, dikarenakan tidak ada pembagian waris secara pasti yang menjadikan kedua anak tersebut mengalihkan harta berupa tanah itu, menimbulkan sengketa setelah Zaini, anak dari Aliwafa berusaha untuk menyertifikat rumah yang berdiri diatas tanah waris itu yang kemudian tidak disetujui oleh Munir selaku tetangga dekat dan termasuk ahli waris dari H. Mostapa Asmat yang telah membeli tanah itu terhadap Mudzakkir. Karena bersitegang yang seharusnya diselesaikan secara damai itulah kemudian terjadi sengketa perebutan hak milik antara Munir dan Zaini terhadap tanah waris yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Perebutan yang mana dimata hukum Negara melemahkan keduanya, dikarenakan tanah tersebut beratasnamakan H. Mostapa Asmat tanpa ada pengalihan nama terhadap orang-orang tersebut diatas (Mudzakkir, Aliwafa, Munir dan Zaini), sedangkan Mudzakkir dan Aliwafa, pihak yang mengalihkan tanah kepada mereka telah meninggal dunia.

Ayat tersebut merupakan kata perintah dimana dalam bahasa arab di sebut dengan *amar* (أمر). Melaksanakannya adalah suatu kewajiban selama tidak ada satupun dalil yang me-*nasakh*-nya. Ayat-ayat waris diatas menggunakan *kalam khobar* untuk menyatakannya. Sebagaimana dalam kajian *uṣhūl fiqh*, bahwa penunjukkan kata perintah dapat menggunakan lafadz *amar* secara langsung, atau menggunakan lafaz *muḍāri'* yang didahului oleh lam *amar* atau dapat juga menggunakan *jumlah khabariyyah*.³ Dengan demikian, maka ayat-ayat tersebut adalah kalimat perintah yang harus dikerjakan.

³ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, h. 219

Ironisnya, ahli waris H. Mostapa Asmat yang terdiri dari 1 orang istri dan 4 orang anaknya tidak membagi harta peninggalannya secara rata, padahal mereka mengetahui bahwa membagi harta waris sesuai dengan bagiannya adalah wajib. Terbukti dengan seringnya keluarga besar tersebut diundang untuk mengajari masyarakat sekitar segala macam ilmu pengetahuan, karena selain merupakan tokoh masyarakat di desa tersebut, mereka selama bertahun-tahun menempuh pendidikan di dunia pesantren salaf. 1 petak tanah yang merupakan bagian dari harta peninggalan kemudian digunakan untuk kebutuhan *tajhiz* mayyit telah mengikuti urutan hak pembagian harta peninggalan dan setelah semua selesai dengan meninggalkan harta sepetak tanah yang terletak diatas sungai seluas 153 M yang kini menjadi objek kajian sengketa harus dibagi berdasarkan bagian masing-masing walaupun hanya sebidang tanah kecil, karena berdasarkan pada ayat: *مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ* bahwa sedikit atau banyaknya harta tersebut harus dibagikan kepada yang berhak tanpa ada alasan apapun. Ayat tersebut harus dipahami secara mendalam, bahwa walaupun harta tersebut sedikit, maka tetap dalam kategori harta waris karena tidak pernah ada yang tahu bahwa tanah kecil bisa diperluas, dibangun rumah dan bisa membuat orang bertengkar.

Dengan sangat rinci, hukum yang berkaitan dengan waris secara khusus di bahas di dalam al-Qur'an karena melihat keterbatasan manusia memecahkan bagian ahli waris dengan seadil-adilnya. Ketetapan tersebut untuk menjaga hak

Jika pada permasalahan yang bisa di-nalar oleh akal manusia, Allah mewahyukan ayat-Nya secara global, akan tetapi pada ayat ini diuraikan begitu rinci bagiannya agar manusia benar-benar mudah untuk melaksanakan syari'atnya. Berkali-kali dalam ayat waris sebagaimana tersebut diatas, ditekankan bahwa ketentuan ini adalah dari Allah yang harus dikerjakan. Jika mengaku muslim dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai penyampai Risalah-Nya, maka sedikit apapun harta tersebut harus tetap dibagikan sebagai bentuk ketakwaan kepada pemilik syari'at, karena jika tidak, maka diganjar dengan siksa yang pedih dan neraka sesuai dengan penggalan ayat ke-14 Qs.an-Nisa' diatas. Maka pada saat ini, selama masih ada ahli waris dari H.Mostapa Asmat, maka tanah tersebut harus tetap dibagi. Karena selain mereka mengetahui terhadap kewajiban mempelajarinya, mereka juga harus

العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر

(segera) karena *qarīnah*-nya adalah *aḥwāl* (keadaan) berupa sengketa yang terjadi di karenakan pembagian yang seharusnya dilaksanakan dengan secepatnya menjadi tertunda bahkan terlupakan. Hal tersebut menjadi peringatan bahwa

menunda-nunda sesuatu yang bersifat wajib yang memungkinkan terjadi hal yang lebih dikhawatirkan lebih baik untuk menyegerakan pelaksanaannya. Seperti perintah untuk melaksanakan sholat, tidak menunjukkan untuk dikerjakan secepatnya, akan tetapi apabila menundanya menjadikan melalaikannya maka lebih baik untuk menyegerakan pelaksanaannya.

Perintah berbentuk kata **أَلْحَقُوا** dengan *ṣighat amar* yang jelas menunjukkan kewajiban dilaksanakan karena tidak dibatasi dengan lafaz **لَا** untuk menghapus atau menundanya. Maka selayak-nya-lah kaidah fiqh yang dibuat oleh manusia melihat pada umumnya keadaan bisa berubah mengikuti kepada keadaan yang terjadi. Untuk itu, kewajiban membagi harta waris dengan cepat setelah kematian pewaris adalah wajib.

Keluarga besar H. Mostapa Asmat yang pada hakikatnya merupakan tokoh masyarakat di Desa tersebut, dimana tingkah laku mereka dicontoh oleh masyarakat sekitar, dijadikan panutan segala petuahnya, akan tetapi bersengketa dalam masalah harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 153 M yang pada ujungnya adalah karena merupakan harta waris yang tidak dibagi, harus dipahami sebagai cambukan pertama peringatan Allah kepada Hamba-Nya yang tidak mengindahkan Syari'at-Nya. Diberi Adzab atau siksa di dunia dengan persengketaan yang pelik dimana pada akhirnya para pihak sama-sama tidak mendapatkannya secara utuh.

"Tidak akan masuk syurga orang yang suka memutuskan hubungan tali persaudaraan".

Allah memerintah kita untuk berbuat baik terhadap tetangga dekat (tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat, sesama muslim dan istri / suami) dan tetangga jauh (tetangga yang bukan kerabat, berlainan agama dan teman sejawat) sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Nisa' : 122-123. Pada Qs. Ali Imran : 134, disebutkan bahwa Allah akan memberikan ampunan dan syurga yang seluas-luasnya kepada orang-orang yang bertaqwa yang diantaranya adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan orang yang memaafkan orang lain. Tidak baik jika bertahan dengan keangkuhan kemarahan walaupun kita telah di-zalimi, dan merupakan pekerjaan paling mulia memaafkan kesalahan orang seperti apapun besarnya. Karena Allah Swt. saja Maha Pengampun dan memaafkan kesalahan hamba-hamba-Nya yang bersalah atau berbuat dosa terhadap-Nya sedangkan kita yang hanya merupakan makhluk kecil di hadapan-Nya bersingkap congkak dengan tetap bermusuhan dengan orang lain bahkan kerabat sendiri, maka sungguh bersiap-siap-lah untuk berada ditempat selain syurga-Nya. *Na'uzubillahi min zalik.*

Watak keras yang amat terkenal dikalangan masyarakat Blumbungan terhadap keluarga besar H. Mostapa Asmat tidak seharusnya dipertahankan hingga turunan ke-3 ini. Bahkan mungkin keturunan lanjutan lainnya. Jawaban keluarga besar Zaini yang merasa sakit hati terhadap perlakuan Munir terkait pengakuannya terhadap kepemilikan tanahnya yang berkelanjutan dengan

Dan Munir, dengan perasaan sakit hati mendalam karena perbuatan tidak mengenakan Zaini sebelum pembongkaran rumah Zaini tidak seharusnya tetap dengan keangkuhan menunggu Zaini yang meminta maaf. Allah lebih menyukai tangan yang diatas dari pada yang dibawah sebagaimana ungkapan :

Dengan pemahaman tangan yang pertama kali terulur dengan niat baik mengakhiri permusuhan lebih baik dari pada orang yang menunggu orang lain mengulurkan tangan sebagai ungkapan permohonan maaf. Dan sungguh tergolong penganut agama yang baik apabila perintah Allah dan Rasul-Nya diikuti dengan benar.

Watak keras manusia yang bertahan dengan keangkuhan tidak pantas untuk tetap dipertahankan. Zaini dan Munir sudah saatnya untuk menyadari kekeliruannya. Pihak keluarga mendukung kebaikan perdamaian dan pembagian secara baik dan benar, kepala desa dengan kewenangan besarnya harus benar-benar memberikan jalan keluar terbaik untuk masyarakatnya, masyarakat tidak semakin memperkeruh suasana dengan menambah-nambahkan cerita, dan tokoh

masyarakat setempat harus benar-benar mengulang dan memperbanyak petuah tentang perintah Allah yang bersifat wajib. Maha Besar Allah dengan segala Hikmah yang terjadi di balik semua peristiwa. Semoga kita senantiasa selalu dalam petunjuknya. Amin.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, bahwa :

- 81

pengalihan tersebut merasa sama-sama memiliki hak terhadap tanah tersebut) sehingga akhirnya menyebabkan sengketa.

3. Adapun analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris yang tidak dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Qs.an-Nisa' mulai dari ayat 7-14, harus dibagi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, karena pelaksanaan dari ayat tersebut bersifat wajib karena tidak ada satupun ayat yang menentangnya. Ayat tersebut diperkuat dengan hadis nabi berbentuk kalimat *amar* yang menunjukkan pelaksanaan yang bersifat cepat, dikarenakan terkait dengan hak-hak harta peninggalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berarti melanggar dari ketentuan Allah dimana orang tersebut menjadi dosa dan dijanjikan neraka. Sengketa yang timbul merupakan dampak dari pelanggaran tersebut, jika pembagian tersebut dilaksanakan secepat mungkin dengan jalan musyawarah setelah meninggalnya H. Mostapa Asmat sehingga setiap ahli waris mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh, maka tidak akan timbul rasa memiliki terhadap tanah seluas 153 M tersebut dan tidak akan mentransaksikannya sesuai keinginannya yang berujung sengketa karena pihak yang menerima pengalihannya sama-sama merasa memiliki. Bahkan saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah membagi dengan musyawarah dengan pertama kali menyambung kembali hubungan kerabat yang sempat terputus karena keangkuhan masing-masing pihak.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Sebagai Hamba yang taat kepada perintah tuhan Yang Maha Kuasa, hendaklah lebih hati-hati memahami perintah Allah khususnya kewajiban pembagian harta waris. Tidak menyepelekan harta yang ditinggalkan walaupun hanya sedikit karena Allah tidak memberikan toleransi untuk tidak melaksanakannya.
2. Pihak yang bersengketa seharusnya mengadakan pertemuan untuk melaksanakan musyawarah keluarga dengan agenda pembahasan perdamaian pihak-pihak yang bersengketa, bermufakat dalam pembagiannya dengan memberikan keputusan berbentuk konkrit dengan didukung oleh pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Serta dukungan dari keluarga besar terutama yang berpendidikan tinggi.
3. Masyarakat sekitar berhati-hati dalam segala peristiwa yang terjadi, tidak memperkeruh suasana dan membantu perdamaian tersebut.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1965

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B. Afif Muhammad Dan Idrus al-Kaff*, Jakarta, Lentera Basritama, 1996

Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Kusari, Acmad, *Sistem Asabah, Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah II*, Cairo, Mustafa al-Babiy, t.t.

Maragi, al-, Ahmad Muṣṭhafa, *Tafsir al-Maragi 4, Terj.*, Semarang, CV Toha Putra, 1993

Muhammad Fairuz, A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 2007

Muhammad Makhluf, Hasanain, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo, Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958

Musthofa al-Ghalayainiy, Asy-Syekh, *Jami'I al-Durūs al-'Arabiyyah*, Beirut, Dār al-kitāb al-'Ilmiyyah, 2007

Nawawiy, al-, *Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim*, Cairo, al-Mathba'ah al-Misriyah, t.t.

Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an II*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Ind Hill Co, 1984

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang, Toha Putera, 1972

Salman dan Mustofa Haffas, Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2006

Shiddieqy Al-, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan Dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2000

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1997

